



EDISI SELASA 10 FEBRUARI 2026

HARIAN

LENTERA

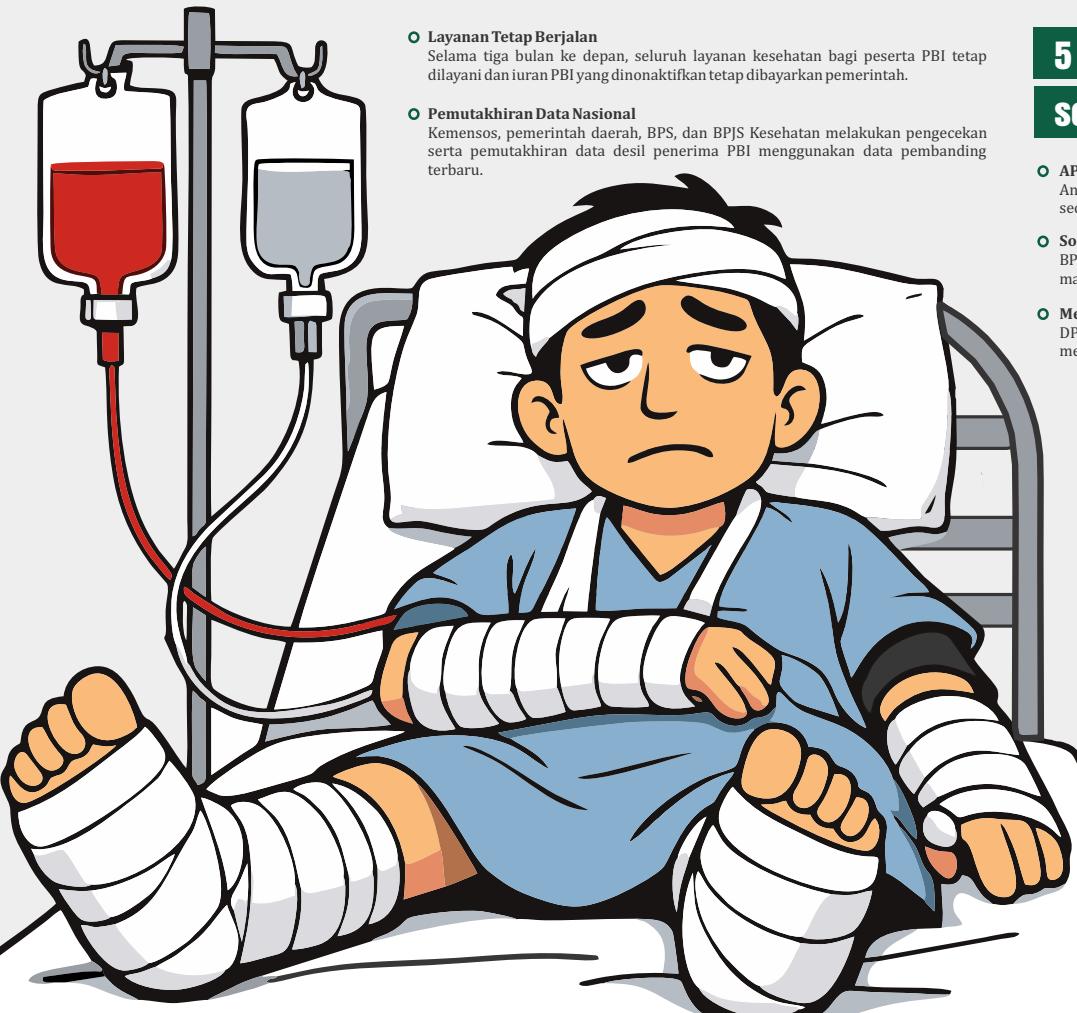
Inspirasi Perubahan

02
04
10GOVERNMENT TODAY
Sinyal Prabowo ke AS Pekan Depan:
Bo dan Tarif DagangNUSANTARA
Kala Kasat Narkoba Polres Bima Jadi
Tersangka Peredaran SabuLISTSTYLE
Ketahui Penyebab Kulit Kusam dan
Tips Perawatannya

MASALAH BERLARUT BUNTUT DATA BPJS YANG SEMRAWUT

54 Juta Warga Miskin Gigit Jari Saat 15 Juta Orang Mampu Nikmati PBI

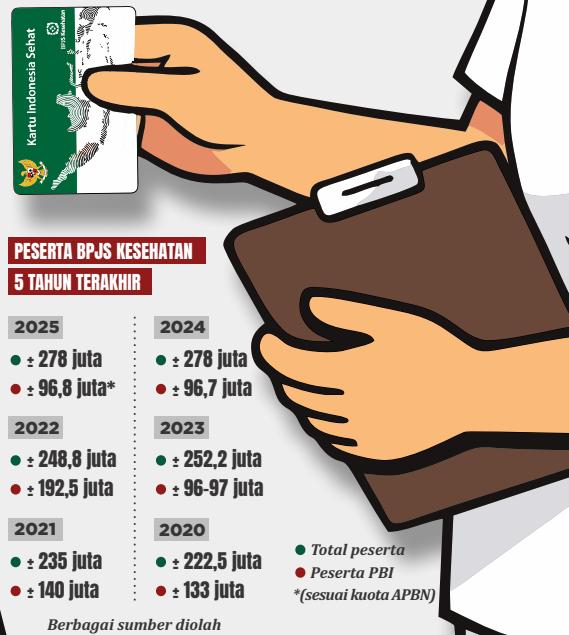
P persoalan data kembali menjadi titik rapuh dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pemutakhiran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepanjang 2025 justru mengungkap ketimpangan serius dalam distribusi subsidi negara. Menteri Sosial Saifulloh Yusuf menyebut, dari total kuota PBI sebesar 96,8 juta jiwa, sekitar 54 juta warga miskin yang berada pada kelompok desil 1 hingga 5 malah belum tercatat sebagai penerima. Pada saat yang sama, lebih dari 15 juta warga dari kelompok desil 6 hingga 10--golongan menengah hingga mampu--justru terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibiayai negara. Ketidaktepatan data tersebut berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penonaktifan dilakukan tanpa pengurangan alokasi anggaran PBI yang tetap disediakan untuk 96,8 juta peserta, dengan total anggaran Rp56,64 triliun dalam APBN 2026. Namun, penyesuaian data yang dilakukan secara serentak dan minim sosialisasi berbuntut kegaduhan publik serta mengancam akses layanan kesehatan. Diketahui sekitar 120 ribu peserta dengan penyakit katastropik dan lebih dari 12 ribu pasien cuci darah terdampak langsung. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK BPJS) akan dibayarkan negara dalam 3 bulan ke depan. Bulan selanjutnya bagaimana? BACA DI HAL 11....



- Layanan Tetap Berjalan
Selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI tetap dilayani dan iuran PBI yang dinonaktifkan tetap dibayarkan pemerintah.
- Pemutakhiran Data Nasional
Kemensos, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil penerima PBI menggunakan data pembanding terbaru.

5 Poin Kesepakatan DPR-Pemerintah soal Penonaktifan PBI BPJS

- APBN Harus Tepat Sasara
Anggaran PBI yang telah dialokasikan dalam APBN dimaksimalkan penggunaannya secara akurat dan tidak salah sasaran.
- Sosialisasi dan Notifikasi
BPJS Kesehatan diminta aktif melakukan sosialisasi serta memberi notifikasi kepada masyarakat jika terjadi penonaktifan kesepertaan PBI maupun BPBU Pemda.
- Menuju Satu Data Jaminan Kesehatan
DPR dan pemerintah sepakat memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan nasional menuju ekosistem data terintegrasi dan satu data tunggal.



Berbagai sumber diolah

SINYAL PRABOWO KE AS PEKAN DEPAN: BOP DAN TARIF DAGANG

Presiden Prabowo Subianto berpeluang menghadiri pertemuan resmi perdana Dewan Perdamaian internasional atau Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Undangan resmi dari pemerintah Amerika Serikat telah diterima, namun kepastian kehadiran kepala negara Indonesia tersebut masih menunggu keputusan final. Selain itu, diketahui juga ada pembahasan krusial yang belum tuntas terkait tarif dagang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hingga kini Istana belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan berangkat ke Amerika Serikat. Menurut dia, keputusan perjalanan luar negeri presiden tidak bisa disampaikan sebelum ditetapkan secara resmi.

"Kan begini, sebelum diputuskan 'yak go, kita akan berangkat tanggal sekian', kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini," ujar Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Meski demikian, Prasetyo memberi sinyal positif terkait peluang keberangkatan Presiden. "Insyallah berangkatlah," katanya. Ia menegaskan, undangan BoP Meeting memang telah diterima pemerintah Indonesia, tetapi keputusan akhir

tetap berada di tangan Presiden.

Pertemuan BoP di Washington tersebut direncanakan menjadi pertemuan resmi pertama dewan itu sejak diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seorang pejabat AS yang dikutip Bloomberg menyebutkan, forum tersebut akan digelar pada 19 Februari mendatang dan Washington akan menjadi markas besar permanen dewan tersebut.

Dewan Perdamaian merupakan elemen kunci dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Gagasan pembentukan dewan ini pertama kali diperkenalkan Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Januari 2026. Sekitar 20 negara tergabung sebagai anggota, termasuk Belarus, Azerbaijan, Hungaria, dan Indonesia.

Trump menyebut BoP sebagai "kumpulan pemimpin paling bergengsi yang pernah ada dalam sejarah." Pada tahap awal, Gedung Putih menggambarkan dewan ini sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas memandu Gaza melalui proses perlucutan senjata dan transisi pemerintahan teknokratis. Inisiatif tersebut sempat memperoleh dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November lalu, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Namun, seiring terbentuknya struktur organisasi BoP, sejumlah sekutu Amerika Serikat di Eropa serta para pemimpin organisasi internasional mulai mempertanyakan arah dan tujuan dewan tersebut. Draft piagam BoP bahkan tidak secara eksplisit menyebut Gaza, sehingga memicu kekhawatiran negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan sejumlah

anggota Uni Eropa. Negara-negara tersebut memilih untuk tidak terlibat dalam keanggotaan dewan.

Di tengah dinamika tersebut, kehadiran Presiden Prabowo di Washington juga berpotensi dimanfaatkan untuk membahas isu perdagangan bilateral. Prasetyo menyebutkan, dalam kunjungan yang sama, Presiden bisa saja menandatangi kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat. Hingga kini, Indonesia dan AS memang belum mencapai kesepakatan final terkait tarif perdagangan resiprokal antara kedua negara.(tin ktn,ist/dya)

INDONESIA BERGABUNG DALAM DEWAN PERDAMAIAN UNTUK GAZA

Tentang Dewan Perdamaian

- **Inisiator:** Digagas dan diketuai oleh Presiden AS, Donald Trump.
- **Fungsii:** Badan internasional baru yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilitasi keamanan, dan reconstruksi Gaza.
- **Kemitraan:** Dalam menjalankan tugasnya, badan ini akan bermitra dengan PBB.

Tujuan Keikutsertaan Indonesia

- Mendukung upaya menghentikan kekerasan di Gaza.
- Melindungi hak dan keselamatan warga sipil yang terdampak konflik.
- Memperkuat akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
- Mendorong terwujudnya perdamaian di Gaza.

Tujuan Keikutsertaan Indonesia

- Indonesia	- Uzbekistan
- Hungaria	- Kazakhstan
- Argentina	- Bahrain
- Belgia	- Maroko
- Mesir	- Bulgaria
- Yordania	- Kosovo
- Paraguay	- Pakistan
- Arab Saudi	- Qatar
- Turki	- Mongolia
- Uni Emirat Arab	



Presiden: TNI-Polri yang Didukung Rakyat Pasti Akan Kuat



Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (9/2/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan diri sebagai institusi yang berpihak dan dicintai rakyat. Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat pimpinan TNI-Polri yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden menekankan pentingnya kepercayaan

publik sebagai fondasi utama kekuatan negara.

Menurut Tito, Prabowo mengingatkan bahwa kekuatan pertahanan dan keamanan tidak semata ditentukan oleh persenjataan dan struktur organisasi, melainkan oleh dukungan rakyat.

"Juga ada hal yang sangat penting sekali disampaikan tadi bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat, ya, kepada negara," ujar Tito di Istana

Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Karena itu, Tito melanjutkan, Presiden meminta agar TNI benar-benar menjadi tentara rakyat dan Polri menjadi polisi rakyat. "Artinya TNI yang didukung oleh rakyat, dicintai oleh rakyat, dan Polri yang didukung dan dicintai oleh rakyat juga, pasti akan kuat," kata Tito.

Secara umum, Tito menyebutkan Prabowo memberikan arahan kepada jajaran pimpinan militer dan kepolisian untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, serta pertahanan negara.

Presiden juga menyoroti pentingnya stabilitas keamanan dalam menghadapi dinamika geopolitik global agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan tanpa gangguan.

Rapat pimpinan TNI-Polri tahun ini berlangsung selama sekitar tiga setengah jam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan agenda tersebut merupakan pertemuan rutin tahunan. Dalam forum itu, Prabowo menyampaikan

arahannya langsung terkait penguatan profesionalisme dan soliditas TNI-Polri.

"Dan terutama tadi pesan beliau untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai rakyat," kata Prasetyo usai rapat.

Selain itu, Prasetyo mengatakan Presiden menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseksan berbagai program pemerintah. Presiden juga meminta kedua institusi terus mempererat persatuan dan memperbaiki kinerja internal. (gus,ist/dya)

DPR WANTI-WANTI RENCANA EKSPOR BERAS

Rencana pemerintah membuka ekspor beras memicu peringatan dari DPR yang meminta kebijakan tersebut dikaji secara hati-hati. Di tengah klaim pemerintah soal peningkatan produksi dan lonjakan serapan beras oleh Bulog, DPR menilai ketahanan pangan nasional belum sepenuhnya aman karena masih dibayangi risiko cuaca ekstrem dan potensi gangguan pasokan, sehingga stabilitas stok dan harga di dalam negeri dinilai harus tetap menjadi prioritas.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merencanakan ekspor beras di tengah kondisi ketahanan pangan nasional yang dinilai masih rapuh. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko tinggi, terutama jika dilakukan tanpa perhitungan yang cermat terhadap stok dan stabilitas harga di dalam negeri.

Firman menyoroti rencana Perum Bulog mengekspor hingga satu juta ton beras ke kawasan Asia. Menurut politikus Partai Golkar itu, Indonesia baru saja keluar dari krisis beras pada 2023 akibat El Nino yang memicu kemarau panjang dan menekan produksi, hingga memaksa pemerintah melakukan impor dalam jumlah besar.

"Jangan ulangi kesalahan masa lalu, beras bukan komoditas biasa tetapi menyangkut perut rakyat," kata Firman, Senin (9/2/2025). Ia



mengingatkan, kekeliruan perhitungan dapat berujung pada lonjakan harga dan terganggunya pasokan di pasar domestik.

Firman menilai kondisi pangan nasional masih dibayangi anomali cuaca, potensi banjir, serta risiko gagal panen di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah dan Bulog diminta memprioritaskan penguatan

cadangan beras nasional sebelum melangkah ke kebijakan ekspor.

"Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan," ujarnya. Ia juga menekankan perlunya peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan sistem antisipasi dampak cuaca ekstrem agar Indonesia tidak kembali bergantung pada impor.

Stok dan Harga Pangan Ramadan Dijamin Aman

PEMERINTAH menyatakan kesiapan stok pangan nasional menjelang Ramadan 2026 dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta pelaku usaha terus dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga hingga Hari Raya Idulfitri.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan secara umum tidak terdapat hambatan berarti dalam ketersediaan bahan pokok. Pemerintah melakukan pemantauan intensif agar stok mencukupi dan harga tetap stabil, tidak hanya selama Ramadan, tetapi juga hingga Lebaran.

"Aman, tidak ada masalah. Relatif aman," ujar Budi seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Budi, koordinasi telah dilakukan dengan dinas terkait, distributor, dan pemasok untuk memastikan kelancaran rantai pasok. Laporan dari pelaku usaha dan distributor menunjukkan tidak ada kendala signifikan dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, dan seluruh rantai pasok dinyatakan siap mengamankan pasokan hingga

Lebaran.

Kementerian Pertanian juga memastikan kondisi serupa. Stok beras nasional tercatat surplus hingga 14,48 juta ton untuk periode Januari-Maret 2026. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan kepastian tersebut diperoleh dari pemantauan proyeksi neraca pangan yang dilengkapi evaluasi lapangan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan, kami melaporkan kondisi produksi, pasokan, dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadan 1447 Hijriyah," kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Selasa (3/2/2026).

Kesiapan pangan juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan berada dalam kondisi aman dan stabil menjelang bulan puasa. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia meninjau langsung pasar tradisional

Pa'baeng-baeng di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 6 Februari 2026.

Selain menjaga stok, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, antara lain percepatan tanam padi pada musim hujan, distribusi pasokan dari wilayah surplus ke daerah defisit, pengawasan pelaku usaha agar mematuhi harga eceran tertinggi, pembentukan satuan tugas sapu bersih, serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Data pemerintah menunjukkan ketersediaan komoditas pangan strategis berada di atas kebutuhan. Stok beras tercatat sekitar 5,12 juta ton dengan kebutuhan 1,38 juta ton. Telur ayam tersedia 1,38 juta ton dengan kebutuhan 1,038 juta ton. Ketersediaan minyak mencapai 4,47 juta ton dengan kebutuhan 914,8 ribu ton, sementara stok daging ayam mencapai 1,19 juta ton dengan kebutuhan 670,6 ribu ton.

Adapun stok garam tercatat 1,45 juta ton dan daging sapi 172 ribu ton, masing-masing di atas kebutuhan nasional.(wid,ist,rls/dya)

PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI TAHUN 2025

Januari	Februari
● 0,42 juta ha	● 0,76 juta ha
● 2,20 juta ton	● 3,96 juta ton
Maret	April
● 1,67 juta ha	● 1,65 juta ha
● 9,08 juta ton	● 9,09 juta ton
Mei	Juni
● 0,98 juta ha	● 0,79 juta ha
● 5,09 juta ton	● 4,01 juta ton
Juli	Agustus
● 0,94 juta ha	● 1,11 juta ha
● 4,80 juta ton	● 5,63 juta ton
September	Oktober
● 1,13 juta ha	● 0,86 juta ha
● 5,97 juta ton	● 4,74 juta ton
November	Desember
● 0,57 juta ha	● 0,44 juta ha
● 3,20 juta ton	● 2,44 juta ton

● Luas Panen ● Produksi Padi

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras. Pernyataan itu disampaikan seiring lonjakan serapan beras oleh Perum Bulog pada awal 2026.

Menurut Amran, peningkatan serapan mencerminkan kapasitas produksi dan stok nasional yang berada dalam kondisi kuat. Dengan laju serapan yang stabil, kata dia, Indonesia tidak hanya mampu mengamankan kebutuhan dalam negeri.

"Kalu ini bertahan dan konstan, insyaallah kita bisa menyuplai negara sahabat," ujarnya, terutama bagi negara-negara yang tengah mengalami kekurangan stok beras.

Data Badan Pangan Nasional mencatat serapan setara beras dari produksi dalam negeri mencapai sekitar 112 ribu ton pada awal 2026. Angka ini meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran 14 ribu ton, sekaligus menjadi capaian tertinggi awal tahun dalam lima tahun terakhir. (tin,ist,kcm/dya)

KALA KASAT NARKOBA POLRES BIMA JADI TERSANGKA PEREDARAN SABU

Daftar aparat penegak hukum terseret dalam perkara peredaran narkotika bertambah panjang. Terbaru, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, sebagai tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Selain diproses pidana, perwira menengah Polri itu juga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi kepolisian.

Penetapan status tersangka diumumkan Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, dalam konferensi pers di Markas Polda NTB, Mataram, Senin (9/2/2026). Menurut Kholid, keputusan tersebut diambil setelah penyidik merampungkan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan naik ke penyidikan, kemudian penyidik berdasarkan dua alat bukti yang sah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Kholid.

Dalam perkara ini, AKP Malaungi diberat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyidik juga menerapkan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kholid menjelaskan, kasus yang



Kasat Narkoba Polres Bima saat diamankan.ist

menjerat AKP Malaungi berawal dari pengembangan hasil penangkapan seorang anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres

Bima Kota, Brigadir Polisi Kepala Karol. Bripka Karol ditangkap bersama istrinya serta dua orang rekannya.

BNN Bali Sita Ratusan Rokok Elektrik Mengandung Etomidate

BADAN Narkotika Nasional Provinsi Bali menyita ratusan rokok elektrik yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate. Pengungkapan ini menandai kembali modus peredaran narkotika melalui produk rokok elektrik yang menyasar pengguna di wilayah perkotaan.

Pelaksana Harian Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Bali, Kombes Pol Tri Kuncoro, mengatakan barang bukti tersebut disita dari seorang laki-laki berinisial RW alias Kris di Jalan Kerta Dalam, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, pada Sabtu (7/2/2026).

"Tersangka mengaku barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang warga

negara asing yang dikenal dengan nama Stone," kata Kuncoro di Denpasar, Senin (9/2/2026).

Menurut Kuncoro, etomidate merupakan narkotika golongan II yang dalam dunia medis digunakan sebagai obat anestesi untuk tindakan operasi. Zat tersebut memiliki efek sedatif, hipnotik, dan relaksasi dengan bekerja pada sistem saraf pusat, sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan.

Kasus ini terbongkar dari hasil analisis intelijen BNN Provinsi Bali terkait informasi jaringan peredaran liquid etomidate yang beroperasi di wilayah Denpasar. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim Bidang

Pemberantasan BNN Provinsi Bali melakukan penelusuran hingga akhirnya menangkap RW.

Dalam penggeledahan di rumah tersangka yang disaksikan oleh aparat lingkungan dan warga setempat, petugas menemukan 72 unit kartrid rokok elektrik. Seluruh kartrid tersebut berisi cairan vape yang diduga mengandung etomidate.

Dari hasil interrogasi awal, penyidik memperoleh informasi bahwa tersangka masih menyimpan narkotika cair lainnya di sebuah rumah sewa yang terletak di seberang rumahnya. Informasi itu kemudian ditindak lanjuti dengan penggeledahan lanjutan. (wid,ist,rls/dya)

KASUS "POLISI NARKOBA" PALING IKONIK YANG MENYEDOT PERHATIAN NASIONAL

● Irjen Teddy Minahasa (2022-2023)
Saat menjabat Kapolda Sumbar, menyisihkan sekitar 5 kg sabu dari barang bukti, menggantinya dengan tawas, lalu menjualnya lewat jaringan perantara. Kasus ini mengguncang Polri karena pelaku berpangkat jenderal. Divonis penjarai seumur hidup dan dipecat tidak hormat (PTDH).

● AKP Andri Gustami (2023)
Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang justru menjadi bagian jaringan gembong narkoba internasional Fredy Pratama. Berperan meloloskan narkoba melalui Pelabuhan Bakauheni dengan imbalan miliaran rupiah. Divonis hukuman mati dan PTDH.

● Kombes Yulius Bambang Karyanto (2023)
Perwira Baharkam Polri tertangkap tangan mengonsumsi sabu di hotel Jakarta Utara bersama seorang wanita. Kasus ini mencoreng Mabes Polri karena melibatkan pejabat aktif. Dijatuhi sanksi PTDH.

● AKP Malaungi (Februari 2026)
Kasat Narkoba Polres Bima Kota ditangkap dengan 488 gram sabu. Kasus ini menyahtakan perhatian publik karena ironi aparat penegak hukum yang justru menjadi pelaku. Masih dalam proses penyidikan.

Dalam penangkapan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa puluhan gram sabu-sabu serta uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi peredaran narkotika. Dari pemeriksaan awal, Bripka Karol ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu.

Dari keterangan Bripka Karol, penyidik memperoleh informasi mengenai peran AKP Malaungi. Nama Kasat Narkoba Polres Bima Kota itu disebut sebagai sumber atau hulu peredaran barang haram yang dikuasai Bripka Karol dan jaringannya.

"Dari keterangan tersangka Bripka Karol, terungkap peran yang bersangkutan sebagai hulu sumber barang," ujar Kholid.

Berdasarkan informasi tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) bersama Direktorat Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap AKP Malaungi. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam peredaran gelap narkotika.

Pada 3 Februari 2026, penyidik melakukan tes urine terhadap AKP Malaungi. Hasil pemeriksaan menunjukkan yang bersangkutan positif mengandung amfetamin, yang merupakan kandungan dari ekstasi atau MDMA, serta metamfetamin yang merupakan kandungan utama dari sabu-sabu. (wid,ant,ist/dya)

Pelaksana Tugas Deputi Pengembangan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penanganan perkara DJKA saat ini masih berfokus pada pengembangan kasus yang menjerat Sudewo. Karena itu, KPK belum dapat menyimpulkan tindak lanjut terhadap pihak lain, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sebelumnya

KRONOLOGI KASUS

- **Periode 2018-2022 (Awal Mula):** Terjadi pengaturan pemenang lelang pada proyek jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera.
- **April 2023 (OTT KPK):** KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan mengamankan 25 orang di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya dengan barang bukti uang senilai Rp2,8 miliar.
- **November 2024 (Eks Dirjen Tersangka):** Mantan Dirjen Perkeretaapian, Prasetyo Boedi Tjahjono, ditetapkan sebagai tersangka terkait korupsi jalur KA Besitang-Langsa yang merugikan negara Rp1,1 triliun.
- **Agustus 2025 (Pengembangan):** KPK menahan Risma Sutriyanto (ASN Kemenhub) selaku Ketua Pokja proyek jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro.
- **Desember 2025 (Wilayah Medan):** KPK menahan tersangka ke-20 berinisial MC (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait korupsi proyek di BTP Medan tahap 2.
- **Januari - Februari 2026 (Status Terbaru):** -Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap saat masih menjabat anggota DPR RI Komisi V.

-KPK tengah mendalami keterlibatan 18 anggota DPR RI periode 2019-2024 dalam aliran dana suap ini.

-Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan kembali mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebagai saksi untuk pendalaman kasus.

KEMBALI mencuatnya dugaan praktik pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Depok menegaskan bahwa persoalan korupsi di lingkungan peradilan belum sepenuhnya teratasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menilai praktik tersebut bukan sekadar kasus individual, melainkan risiko sistemik yang melekat pada seluruh tahapan proses hukum dan memerlukan upaya pencegahan berlapis.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut, potensi korupsi di badan peradilan terbuka sejak perkara mulai ditangani hingga putusan berkekuatan hukum tetap dieksekusi. Menurut dia, kompleksitas proses hukum menciptakan ruang interaksi yang rentan disalahgunakan.

"Pada prinsipnya, itu adalah risiko korupsi yang terjadi di peradilan," ujar Ibnu di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ibnu menjelaskan, celah tersebut dapat muncul sejak fase awal, termasuk dalam penetapan majelis

KPK MENAHAN DIRI SOAL BUDI KARYA DALAM PERKARA DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi masih menahan diri untuk melangkah lebih jauh terhadap pihak-pihak yang namanya mencuat dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Penyidik menyatakan penyidikan baru memasuki tahap awal setelah penetapan dan penahanan Sudewo (SDW), mantan anggota DPR RI sekaligus Bupati nonaktif Pati.



telah diperiksa sebagai saksi.

"Saat ini kan baru mulai nih untuk saudara SDW pada perkara DJKA. Baru kami mulai penanganan perkaranya atau penyidikannya," ujar Asep di

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2/2026). Menurut Asep, setiap langkah lanjutan dalam perkara tersebut harus didasarkan pada kecukupan alat bukti. Ia menegaskan,

Celah Korupsi di Peradilan, Sejak Awal Perkara hingga Eksekusi Putusan

hakim. Risiko serupa juga terbuka pada tahap penangguhan penahanan, penyusunan putusan, penetapan hukum, hingga pelaksanaan eksekusi. Setiap tahapan, kata dia, memiliki potensi disusupi kepentingan di luar hukum apabila integritas aparatur tidak dijaga secara konsisten.

"Mulai dari penetapan hakim, kemudian bisa juga pada penangguhan penahanan, putusan, penetapan, hingga eksekusi," katanya.

Menurut Ibnu, Mahkamah Agung telah berupaya menutup berbagai celah tersebut melalui sejumlah kebijakan pencegahan. Upaya itu mencakup pembinaan internal secara berkala, kunjungan pimpinan MA ke satuan kerja di daerah, serta penguatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan peradilan. PTSP dirancang untuk membatasi kontak langsung antara aparatur pengadilan dan pihak-pihak berperkara.

Selain itu, terdapat aturan yang secara tegas melarang hakim maupun aparatur peradilan bertemu dengan pihak yang berperkara, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun, Ibnu mengakui bahwa dalam praktiknya, pelanggaran masih terjadi.

"Kalau masih ada yang melanggar, itu adalah perbuatan oknum," ujarnya.

Ia menegaskan, munculnya kasus-kasus tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan sistem pembinaan yang dijalankan Mahkamah Agung. Menurut Ibnu, lembaga peradilan telah melakukan pendidikan dan pencegahan secara berlapis untuk menanamkan integritas kepada aparaturnya.

"Bukan berarti Mahkamah Agung tidak mendidik," katanya.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, KPK memperkuat kerja sama dengan Mahkamah Agung, khususnya dalam bidang pendidikan antikorupsi. Dalam beberapa waktu terakhir, KPK turun langsung ke sejumlah pengadilan tinggi di berbagai daerah, antara lain Semarang, Surabaya, Manado, dan Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut, KPK mengumpulkan para hakim tinggi, pimpinan pengadilan, panitera, dan sekretaris pengadilan untuk membahas titik-titik rawan korupsi. Diskusi difokuskan pada pola-pola penyimpangan yang kerap muncul serta langkah-langkah konkret untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang.(wid,rls,ant/dya)

penyidik tidak akan terburu-buru menentukan status hukum seseorang sebelum seluruh rangkaian pembuktian terpenuhi. "Oleh sebab itu, ditunggu saja perkembangan penanganan perkara DJKA Kemenhub," katanya.

Nama Budi Karya Sumadi kembali menjadi perhatian publik seiring berkembangnya perkara DJKA. Budi Karya tercatat terakhir kali diperiksa KPK pada 26 Juli 2023 sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di sejumlah wilayah, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera, untuk periode anggaran 2018-2022.

Kasus DJKA Kemenhub sendiri terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Unit kerja tersebut kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Dari OTT itu, KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan.

Seiring berjalaninya waktu, jumlah tersangka terus bertambah. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 orang tersangka. Selain individu, dua korporasi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proyek-proyek yang menjadi objek dugaan korupsi meliputi pembangunan jalur kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api serta dua proyek supervisi di Lamongan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dalam pelaksanaannya, penyidik men-duga telah terjadi pengaturan pemenang proyek oleh pihak-pihak tertentu. Rekayasa diduga dilakukan sejak tahap administrasi, proses lelang, hingga penentuan pemenang tender.

Di tengah pengembangan perkara tersebut, KPK juga mendalamai dugaan keterlibatan 18 anggota DPR RI periode 2019-2024. Nama-nama legislator tersebut mencuat dalam persidangan perkara DJKA Kemenhub. Mereka adalah Ali Mufthi, Fadholi, Hamka Baco Kady, Ishak Mekki, Lasarus, Lasmii Indaryani, Mochamad Herviano, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Novita Wijayanti, Ridwan Bae, Sadarestuwati, Sarce Bandaso Tandiasik, Sofyan Ali, Sri Rahayu, Sri Wahyuni, Sudjadi, Sukur Nababan, dan Sumail Abdullah.(wid,ist,kum/dya)

Data Lahan Sawah Dilindungi di Kota Malang 'Selegende'



Ilustrasi: Lahan sawah di Kota Malang. (dok. Dispangtan Kota Malang)

MALANG- Data luasan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kota Malang 'selegende' karena terindikasi tak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pemkot diketahui telah melakukan verifikasi lahan sawah dilindungi pada

23-28 Januari 2026. Dari proses tersebut, ditemukan sejumlah lahan yang sebelumnya tercatat sebagai lahan sawah dilindungi kini telah beralih fungsi.

"Hasil verifikasinya sudah kami teruskan ke pusat, kami unggah ke website Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman Kota Malang, Dandung Djulharjanto, Senin (9/2/2026).

Meski demikian, disebutkannya hasil verifikasi masih belum dapat menunjukkan secara langsung berapa siswa luasan lahan sawah dilindungi di Kota Malang saat ini. Dandung mengatakan pihaknya masih

menunggu penetapan resmi dari Kementerian ATR/BPN atas data yang telah dikirimkan.

Ditegaskannya, penetapan dari kementerian akan menjadi bahan penting dalam revisi RTRW Kota Malang. Penyesuaian tata ruang dinilai perlu dilakukan agar dokumen perencanaan wilayah benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

"Di lapangan ada beberapa warga yang mengajukan lahannya dulu masuk LSD tetapi kondisi eksisting sudah berubah, bukan berupa sawah lagi. Banyak yang sudah menjadi perumahan dan peruntukan lain. Itu yang kami kirimkan ke kementerian," jelasnya.

Diketahui, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2022-2042, tercantum proyeksi luasan lahan sawah dilindungi lebih dari 400 hektare. Angka tersebut berpotensi disesuaikan berdasarkan hasil penetapan terbaru dari Kementerian ATR/BPN.

"Makanya penetapan dari kementerian itu nanti sebagai bagian dari revisi RTRW Kota Malang," kata

Dandung.

Ia juga menegaskan, data awal seluas 900 hektare yang menjadi dasar verifikasi, merupakan data milik Kementerian ATR/BPN, bukan hasil penetapan pemerintah daerah.

Dalam proses verifikasi, Dandung menegaskan, PUPR-PKP hanya memfasilitasi laporan masyarakat yang merasa lahannya dahulu masuk kategori LSD namun kini telah berubah fungsi.

Seluruh hasil verifikasi tersebut kemudian disampaikan ke kementerian tanpa ada kewenangan daerah untuk menetapkan ulang luasan lahan.

Pihaknya juga belum dapat memastikan kapan kementerian akan memberikan informasi resmi mengenai sisa luasan lahan sawah dilindungi di Kota Malang, mengingat proses evaluasi dilakukan secara nasional.

"Yang jelas, data yang kami kirimkan ke Kementerian ATR/BPN itu sesuai dengan kondisi eksisting saat ini. Bisa jadi data yang dimiliki kementerian sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan," pungkasnya.(Santi/Dya)

Disparbud Targetkan 6 Juta Wisatawan, Akses Jalan Gondanglegi-Bantur Jadi Tumpuan

MALANG- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 6 juta orang pada 2026. Namun dalam realisasinya, kelancaran akses Jalan Gondanglegi-Bantur menjadi kunci.

Diketahui saat ini ruas tersebut masih dalam pengerjaan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun nanti.

"Kalau Jalan Gondanglegi-Bantur bisa tuntas pada akhir 2026, saya yakin di momen pergantian tahun 2026-2027 nanti bisa mencapai 6 juta," ujar Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, keberadaan akses jalan Gondanglegi-Bantur memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata di wilayah selatan Kabupaten Malang. Selama ini, aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.

Ditegaskannya, potensi pariwisata di Kabupaten Malang masih sangat

terbuka untuk terus dikembangkan. Keberagaman destinasi, mulai dari wisata alam, desa wisata, hingga wisata buatan, menjadi modal utama pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada beberapa tahun mendatang.

Pria yang akrab dengan sapaan Mando, ini menyebut penetapan target kunjungan wisatawan pada 2026 mengacu pada realisasi sepanjang 2025 yang telah menembus lebih dari 5 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 51 ribu di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

Namun demikian, Mando menegaskan selain bergantung pada infrastruktur, peningkatan kunjungan wisatawan juga sangat bergantung pada tata kelola masing-masing destinasi wisata. Menurutnya, pengelola destinasi wisata perlu menyiapkan kualitas layanan dengan menerapkan konsep Sapta Pesona sebagai wujud sadarwisata.

"Pengelola destinasi harus memikirkan bagaimana wisatawan

mendapatkan kenyamanan sekaligus kenangan saat berkunjung," katanya.

Dijelaskannya, sapta pesona merupakan konsep yang diciptakan oleh Kementerian Pariwisata yang mencakup 7 unsur, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Lebih lanjut, Mando juga mengakui tren kunjungan wisata sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global. Ketika ekonomi melemah, menurutnya daya beli masyarakat cenderung menurun sehingga berdampak pada minat berwisata. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi stabil, angka kunjungan wisata biasanya ikut meningkat.

Sebagai langkah konkret, Disparbud Kabupaten Malang akan menyusun kalender event pariwisata



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang. (Santi/Lentera)

yang dipublikasikan sebagai strategi promosi. Kalender tersebut diharapkan menjadi referensi bagi wisatawan dalam merencanakan waktu kunjungan.

"Bukan hanya event yang kami selenggarakan. Event dari stakeholder lain seperti perhotelan dan lembaga kesenian juga kami kumpulkan," imbuhnya.(Santi/Dya)

Korban Dokumen Epstein Terus Berjatuhan

DUBES NORWEGIA MUNDUR, MANTAN PM DISELIDIKI

Terbukanya jutaan halaman dokumen rahasia terkait jaringan Jeffrey Epstein terus memicu efek domino di berbagai negara. Di Norwegia, pengungkapan arsip tersebut menjatuhkan seorang diplomat aktif dan menyeret mantan perdana menteri (PM) ke dalam pusaran penyelidikan pidana, menandai salah satu dampak paling serius di Eropa sejauh ini.

Mona Juul, Duta Besar Norwegia untuk Yordania yang juga merangkap Irak, secara resmi mengundurkan diri setelah jejak komunikasinya dengan Epstein terungkap ke publik. Pengunduran diri itu diumumkan di tengah penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri Norwegia yang menelaah relasi Juul dengan Epstein, pemodal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelaku kejahatan seksual.

Langkah mundur Juul dipandang sebagai konsekuensi politik yang tidak terelakkan. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap jabatan diplomatik tersebut telah runtuh sejak hubungan itu terkuak.

"Sangat sulit untuk memulihkan kepercayaan pada jabatan tersebut setelah hubungan ini terkuak," ujar



Mona Juul, Duta Besar Norwegia untuk Yordania yang juga merangkap Irak

Eide dalam pernyataan resmi, dilihat Senin (9/2/2026).

Juul sebelumnya telah dibebastugaskan sejak pekan lalu guna menjalani pemeriksaan internal. Penyelidikan itu tidak berhenti pada

aspek etika personal, melainkan diperluas ke persoalan finansial dan jejaring kelembagaan yang melibatkan pejabat negara.

Kementerian Luar Negeri Norwegia kini menelusuri aliran

Di Inggris, Pangeran William-Kate Middleton Buka Suara



Melania Trump, Pangeran Andrew, Gwendolyn Beck dan Jeffrey Epstein di sebuah pesta di klub Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 12 Februari 2000 (Getty Images)

GELOMBANG pengungkapan dokumen Jeffrey Epstein terus memicu krisis reputasi di jantung kekuasaan Inggris. Setelah menyeret nama Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor, arsip terbaru itu kini memaksa Istana Kensington angkat bicara dan mengguncang lingkaran terdekat Perdana Menteri Keir Starmer di Downing Street.

Pangeran William dan Kate Middleton untuk pertama kalinya menyampaikan pernyataan resmi terkait skandal Epstein files yang kembali menyorot paman mereka, Andrew. Melalui juru bicara Istana Kensington, Pangeran dan Putri Wales menyatakan keprihatinan mendalam

atas pengungkapan yang terus berlanjut dan menegaskan fokus mereka berada pada para korban.

"Saya dapat memastikan bahwa Pangeran dan Putri sangat prihatin dengan pengungkapan yang terus berlanjut. Pikiran mereka tetap terfokus pada para korban," ujar juru bicara Istana Kensington, Senin (9/2/2026).

Pernyataan ini menandai sikap publik pertama William dan Kate sejak dokumen Epstein dirilis secara masif oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat akhir Januari lalu. Selama bertahun-tahun, keduanya memilih diam, sementara Pangeran Andrew menghadapi tuduhan berulang terkait hubungan dengan Epstein.

Nama Andrew kembali mencuat setelah dokumen terbaru memuat foto dirinya berlutut di atas seorang perempuan yang terbaring di lantai, serta korespondensi email yang menunjukkan undangan Epstein ke Istana Buckingham untuk pertemuan bersifat "pribadi".

Berkas lain mengungkap dugaan

bahwa Andrew membocorkan informasi rahasia negara saat menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

Dokumen yang ditinjau BBC menunjukkan Andrew diduga memberikan laporan resmi perjalanan ke Singapura, Hong Kong, dan Vietnam kepada Epstein pada 2010-2011.

Bahkan, pada malam Natal 2010, ia disebut mengirim pengarahan sensitif terkait peluang investasi rekonstruksi Provinsi Helmand di Afghanistan--proyek yang dibiayai dana publik Inggris.

Sebagai utusan perdagangan, Andrew terikat kewajiban menjaga kerahasiaan informasi komersial dan politik. Pelanggaran atas kewajiban tersebut berpotensi bersinggungan dengan Official Secrets Acts, meskipun hingga kini belum ada dakwaan pidana yang diajukan.

Andrew membantah melakukan kesalahan. Namun, catatan email memperlemah klaimnya bahwa ia telah memutus hubungan dengan Epstein pada Desember 2010. Korespondensi tercatat masih berlangsung hingga Februari 2011, saat Andrew bahkan menyarankan Epstein berinvestasi di sebuah firma ekuitas swasta.(rtr,wid,ist/dya)

PEJABAT DAN TOKOH DUNIA MENGUNDURKAN DIRI PER FEBRUARI 2026 BUNTUT DOKUMEN EPSTEIN

Inggris

- Peter Mandelson (Inggris): Mundur sebagai Dubes Inggris untuk AS dan keluar dari Partai Buruh setelah dokumen baru mengungkap relasinya dengan Epstein.

- Morgan McSweeney (Inggris): Kepala Staf PM Keir Starmer, mundur 8 Feb 2026 akibat tekanan atas perannya menunjuk Mandelson.

- Tim Allan (Inggris): Direktur Komunikasi Downing Street, mundur 9 Feb 2026 untuk perombakan tim pasca-skandal.

Eropa

- Mona Juul (Norwegia): Mundur sebagai Dubes Norwegia untuk Yordania dan Irak karena kontak masa lalu dengan Epstein.

- Miroslav Lajcak (Slovakia): Penasihat Keamanan Nasional, mundur usai korespondensi dengan Epstein bocor.

- Jack Lang (Prancis): Mundur sebagai Presiden Arab World Institute akibat tekanan atas hubungannya dengan Epstein.

Lainnya

- Caroline Lang: Putri Jack Lang, mundur dari Social Progress Imperative setelah namanya muncul dalam dokumen.

- Bos Sweden for UNHCR: Pimpinan UNHCR Swedia mundur setelah tercantum dalam berkas.

- Brad Karp (AS): Ketua firma hukum Paul Weiss mundur usai email korespondensinya dengan Epstein terungkap.

hibah dan hubungan Juul dengan International Peace Institute (IPI), sebuah lembaga pemikir internasional yang pernah dipimpin oleh suaminya, Terje Rod-Larsen. Nama Rod-Larsen disebut dalam dokumen Epstein sebagai salah satu figur yang memiliki keterkaitan luas dengan jaringan Epstein. Temuan awal tersebut dinilai mengkhawatirkan oleh pemerintah Norwegia.

"Tidak diragukan lagi, ini adalah potret penilaian yang sangat buruk," kata Eide, merujuk pada keterlibatan lingkaran terdekat Juul dengan Epstein.(agp,ist,gus/dya)



KEBIASAAN BURUK DI DAPUR PEMICU KERACUNAN MAKANAN

Keracunan makanan sering kali dikabarkan terjadi di luar lingkungan rumah, mulai restoran atau jajanan kaki lima yang kurang bersih. Namun, keracunan juga dapat terjadi di dalam rumah, yaitu di dapur tempat tinggal sendiri.

Padahal, sering kali penyebabnya bukanlah sesuatu yang besar, melainkan kebiasaan yang dilakukan tanpa kita sadari. Dari cara mencuci bahan makanan, menyimpan makanan atau penggunaan talenan yang tidak tepat dapat membuka jalan bagi kontaminasi kuman.

Rutinitas memasak sehari-hari, terdapat beberapa resiko yang lepas dari perhatian. Untuk mengenali dan menghindari kebiasaan yang berisiko bisa menjadi langkah penting untuk menjaga keluarga tetap sehat dan aman di dalam rumah.

Tidak mencuci tangan

Mencuci tangan sebelum masak sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Namun, yang sering terlewat bahkan disepakati adalah momen di tengah proses memasak.

Setelah memegang daging mentah, membuang sisa sayuran, atau sekedar merapikan sampah makanan, tangan yang tidak segera dicuci dapat menjadi jalur bagi bakteri, dan tanpa sadar kamu memindahkannya ke sayuran segar, peralatan masak, bahkan sampai ke permukaan meja dapur.

Cara mencegahnya yaitu, setiap kali selesai mengelolah bahan mentah, luangkan waktu sebentar untuk mencuci tangan dengan sabun setidaknya selama 20 detik. Langkah kecil ini akan menjadi benteng dalam

mencegah kontaminasi silang dan menjaga makanan tetap aman bagi keluarga.

Mengerjakan peralatan dengan lap dapur.

Lap dapur yang sering dipakai untuk berbagai hal, seperti menyeka tumpahan, mengeringkan piring, hingga mengelap tangan. Namun, justru karena terlalu sering dipakai untuk berbagai hal, lap cepat berubah menjadi tempat berkumpulnya para kuman, jika lap itu jarang dicuci.

Solusi paling aman adalah membiarkan piring dan peralatan masak lainnya kering dengan sendirinya. Dengan cara ini menjadi lebih higenis, sekaligus mencegah perpindahan bakteri dari kain lap ke peralatan makan yang akan digunakan.

Mencuci ayam mentah

Beberapa orang merasa wajib untuk mencuci ayam mentah sebelum dimasak agar memastikan kebersihannya. Faktanya, kebiasaan ini justru bisa membawa risiko kesehatan. Percikan air dari cucian ayam dapat mengenai wadah tempat mencuci, meja, atau peralatan dapur, lalu menyebarluaskan bakteri seperti *Salmonella* dan *Campylobacter*.

Ayam mentah seharusnya tidak perlu dicuci sebelum dimasak, yang terpenting adalah memastikan daging dimasak hingga matang sempurna. Karena suhu panas saat memasak akan membunuh bakteri.

Salah menggunakan talenan

Memotong daging di talenan kemudian lanjut memotong sayur tanpa mencuci ulang. Kebiasaan ini

akan memicu terjadinya kontaminasi silang. Bakteri dari daging mentah dengan mudah akan berpindah ke sayuran yang segar.

Cara mencegahnya dengan membiasakan untuk mencuci ulang talenan atau dengan memisahkan talenan, satu khusus untuk daging hewan atau ikan, dan satu lagi untuk sayuran dan bahan yang siap dipakai.

Setelah selesai digunakan, segera cuci talenan dengan air panas dan sabun, lalu biarkan kering dengan udara. Langkah sederhana ini dapat menghilangkan risiko penyebaran bakteri dan menjaga keamanan makanan.

Mencairkan makanan beku dengan cara yang salah

Banyak orang yang masih membiarkan daging atau ikan beku mencair di suhu ruang. Padahal, cara ini dapat membuat makanan berada terlalu lama di "zona bahaya" dalam suhu 5-57 derajat Celcius, suhu bakteri dapat tumbuh dengan sangat mudah dan cepat. Cara aman untuk mencairkan makanan yang beku dengan menyimpannya di kulkas, merendam dalam air dingin (bukan panas), menggunakan microwave, memasak langsung tanpa dicairkan terlebih dahulu.

Membiarakan kulkas penuh

Kulkas sering dianggap sebagai tempat paling aman untuk menyimpan makanan. Namun, ketika terlalu penuh, sirkulasi udara dingin di dalamnya tidak lagi bekerja dengan baik. Sehingga menyebabkan bahan makanan bisa lebih cepat rusak tanpa

disadari, meski sudah tersimpan dengan rapi. Mencegah terjadinya kontaminasi kuman, dengan mengatur isi kulkas dengan baik dan bijak. Pisahkan makanan berdasarkan jenisnya, simpan daging mentah di bagian bawah dengan pembungkus rapat agar cairannya tidak menetes ke bahan lain, dan jangan lupa rutin memeriksa suhu kulkas.

Suhu ideal sekitar 4 derajat celcius akan membantu menjaga kesegaran makanan lebih lama dan mengurangi resiko pertumbuhan bakteri. (Ella-UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)

Penyebab Keracunan Makanan

Infeksi mikroorganisme

Keracunan makanan sering terjadi akibat kontaminasi bakteri, virus, atau parasit.

Kontaminasi zat berbahaya

Keracunan makanan juga bisa disebabkan oleh paparan pestisida, bahan pengawet berlebihan, atau logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik.

Kesalahan pengolahan /penyimpanan makanan

Risiko keracunan makanan bisa meningkat akibat kebiasaan tidak higenis.

Point Nemo, Titik Tersunyi Bumi yang Jadi Peristirahatan Terakhir ISS

Selama lebih dari dua dekade, Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS) telah menjadi rumah bagi manusia di orbit Bumi. Sejak diluncurkan pada 1998 dan dihuni secara permanen mulai 2 November 2000, ISS menandai era panjang keberadaan manusia di luar angkasa tanpa jeda. Namun, sebagaimana semua misi besar dalam sejarah, perjalanan ISS juga memiliki batas akhir.

Setelah masa operasinya diperpanjang hingga 2030, stasiun antariksa raksasa ini dijadwalkan untuk dipensiunkan pada 2031. Tempat peristirahatan terakhirnya bukanlah museum atau daratan, melainkan sebuah titik paling terpencil di planet ini yaitu Point Nemo.

Point Nemo dikenal sebagai oceanic pole of inaccessibility, yaitu titik di lautan yang paling jauh dari daratan mana pun di Bumi. Lokasinya berada di Samudra Pasifik Selatan, ribuan kilometer dari wilayah berpenghuni.

Tiga daratan terdekat dari Point Nemo Pulau Ducie, Motu Nui di dekat Pulau Paskah, dan Pulau Maher di Antarktika masing-masing berjarak sekitar 2.700 kilometer. Jarak ekstrem ini membuat Point Nemo kerap dijuluki sebagai tempat paling sunyi di dunia.

Ironisnya, manusia terdekat dari titik ini dalam kondisi normal justru bukan pelaut atau penduduk pulau, melainkan para astronaut di ISS yang

melintas di orbit Bumi, ratusan kilometer di atas permukaan laut.

Pada 2024, duo petualang ayah dan anak, Chris dan Mika Brown, berani mengunjungi Point Nemo secara langsung. Keluarga Brown dikenal gemar menjelajahi "kutub keterpencil", baik di darat maupun di laut yakni titik-titik yang paling jauh dari akses manusia.

Namun, perjalanan menuju Point Nemo tidaklah mudah. Mereka harus menumpang kapal dan berlayar hampir sepuluh hari melintasi Samudra Pasifik Selatan yang terkenal dengan kondisi cuaca ekstrem. "Di bawah lintang 40 derajat selatan, tidak ada hukum. Di bawah 50 derajat, tidak ada Tuhan," ujar Mika Brown untuk menggambarkan kerasnya kondisi laut.

Point Nemo sendiri berada di sekitar lintang 49 derajat selatan, wilayah yang sepenuhnya terbuka terhadap badai dan gelombang besar. Gelombang laut setinggi enam hingga delapan meter terus menghantam kapal. Setiap sekitar 13 detik, kapal terasa seolah dijatuhkan dan diangkat kembali oleh ombak. Mabuk laut, muntah, dan kelelahan menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut.

Salah satu alasan utama Point Nemo dipilih sebagai lokasi "pemakaman wahana antariksa" adalah kedalaman lautnya yang sangat ekstrem.

Sejak 1971, lebih dari 260 wahana antariksa, termasuk satelit dan stasiun luar angkasa lama, telah diarahkan jatuh ke



wilayah sekitar Point Nemo. Meskipun secara teknis dapat dikunjungi, pengalaman berada di perairan ini jelas bukan untuk semua orang.

"Aku tidak suka air yang dalam," kata Mika. Ia bahkan menolak menggunakan kacamata renang dan memilih untuk tidak menenggelamkan kepala ke dalam air.

Mengapa Dipilih NASA?

Keterpencilan yang ekstrem, minimnya aktivitas manusia, serta kedalaman laut yang besar menjadikan Point Nemo lokasi ideal untuk proses penurunan orbit secara terkendali (controlled

deorbit).

Saat ISS diturunkan dari orbitnya pada 2031, sebagian besar strukturnya akan terbakar di atmosfer, sementara sisanya akan dijatuhkan ke Kawasan ini.

NASA dan mitra internasionalnya berupaya memastikan bahwa akhir masa tugas ISS tidak menimbulkan risiko keselamatan, dan Point Nemo dianggap sebagai lokasi paling aman di Bumi untuk tujuan tersebut. Meski jarang dikunjungi dan hampir tidak dikenal publik, Point Nemo akan menjadi saksi bisu berakhirnya salah satu proyek ilmiah terbesar umat manusia. Di titik paling sunyi di planet ini, ISS simbol kolaborasi global dan eksplorasi antariksa akan mengakhiri perjalannya. (Itqiyah_UINSA yang berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO: NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: GATOT SUNARKO | JOMBANG : SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO | BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

Ketahui Penyebab Kulit Kusam dan Tips Perawatannya

Kulit kusam menjadi salah satu masalah kecantikan yang paling sering dikeluhkan, baik oleh perempuan maupun laki-laki.

Kondisi ini ditandai dengan tampilan kulit yang tampak lelah, warna tidak merata, serta berkurangnya kilau alami wajah. Meski tidak berbahaya, kulit kusam kerap memengaruhi kepercayaan diri.

Para ahli menyebut, kulit kusam umumnya muncul akibat kombinasi faktor eksternal dan kebiasaan sehari-hari yang kurang tepat.

Salah satu penyebab utama kulit kusam adalah paparan sinar matahari berlebih.

Sinar ultraviolet (UV) dapat merusak lapisan pelindung kulit, memicu penumpukan sel kulit mati, serta menyebabkan hiperpigmentasi. Dalam jangka panjang, paparan UV tanpa perlindungan juga dapat mempercepat penuaan dini dan membuat kulit tampak lebih gelap serta tidak bercahaya.

Selain sinar matahari, polusi udara turut berperan besar. Partikel kotoran dan debu yang menempel di wajah dapat menyumbat pori-pori dan mengganggu proses regenerasi kulit. Jika

tidak dibersihkan dengan baik, polusi dapat memicu peradangan ringan yang membuat kulit terlihat kusam dan kasar.

Faktor gaya hidup juga tak kalah berpengaruh. Kurang tidur, stres berkepanjangan, serta kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol berlebihan dapat menghambat sirkulasi darah ke kulit.

Akibatnya, pasokan oksigen dan nutrisi ke sel kulit berkurang, sehingga wajah tampak pucat dan tidak segar. Selain itu, asupan cairan yang minim membuat kulit kehilangan kelembaban alaminya.

Untuk mengatasi kulit kusam, perawatan dasar kulit perlu dilakukan secara konsisten. Membersihkan wajah dua kali sehari menjadi langkah awal yang penting untuk mengangkat kotoran, minyak, dan sisa polusi.

Penggunaan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit membantu menjaga keseimbangan alami kulit tanpa membuatnya kering atau iritisasi.

Eksfoliasi juga dianjurkan untuk membatu mengangkat sel-sel kulit mati yang

- •
- •
- •
- •
- •

menumpuk di permukaan kulit. Proses ini dapat dilakukan satu hingga dua kali seminggu, baik dengan produk eksfoliasi kimia maupun fisik yang lembut. Dengan eksfoliasi rutin, kulit akan terlihat lebih halus dan cerah karena regenerasi sel berlangsung lebih optimal.

Perlindungan dari sinar matahari menjadi kunci utama dalam menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Penggunaan tabir surya dengan SPF yang memadai setiap hari, termasuk saat cuaca mendung, membantu mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV.

Tabisurya sebaiknya diaplikasikan ulang setiap beberapa jam, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Perawatan dari dalam tubuh juga tidak boleh diabaikan. Mengonsumsi air putih yang cukup membantu menjaga kelembapan kulit, sementara makanan kaya vitamin C, E, dan antioksidan berperan melindungi kulit dari radikal bebas. Buah, sayuran, serta protein berkualitas mendukung proses perbaikan sel kulit secara alami.

Tak kalah penting, kualitas tidur dan pengelolaan stres turut memengaruhi kondisi kulit secara keseluruhan. Saat tidur cukup dan berkualitas, tubuh memasuki fase perbaikan alami di mana sel-sel kulit meregenerasi diri, memperbaiki kerusakan akibat paparan polusi, sinar matahari, serta aktivitas sehari-hari. Kurang tidur dapat mengganggu proses ini, sehingga kulit tampak lebih kusam, kering, dan rentan terhadap tanda penuaan dini.

Sementara itu, stres yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu peningkatan hormon kortisol dalam tubuh. Hormon ini berperan besar dalam memperburuk kondisi kulit, mulai dari munculnya jerawat, peradangan, hingga menurunnya elastisitas kulit. Dengan menerapkan teknik pengelolaan stres seperti relaksasi, olahraga ringan, meditasi, atau sekadar meluangkan waktu untuk diri sendiri, keseimbangan hormon dapat lebih terjaga dan berdampak positif pada kesehatan kulit.

Dengan memahami berbagai penyebab kulit kusam mulai dari faktor internal hingga kebiasaan sehari-hari serta menerapkan perawatan yang tepat, memiliki kulit cerah dan sehat bukanlah

hal yang mustahil. Konsistensi dalam menjaga kebersihan kulit, memberikan perlindungan dari faktor lingkungan, serta menerapkan gaya hidup sehat secara menyeluruh menjadi kunci utama agar kulit tetap tampak segar, bercahaya, dan terawat setiap hari. (Inna - UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

Masker Bahan Alami

mengandung enzim dan vitamin yang efektif mencerahkan kulit:



Lidah Buaya



Timun



Tomat



Madu



Yogurt



Masalah Berlarut Buntut ...dari hal 1

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, berdasarkan pemetaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekitar 54 juta masyarakat dari kelompok desil 1 hingga 5 belum tercatat sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan sepanjang 2025. Angka tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR di Gedung Parlemen, Senin (9/2/2026), ketika DPR mempertanyakan dasar penonaktifan jutaan peserta PBI.

Menurut Saifullah Yusuf, penonaktifan kepesertaan PBI dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan pembersihan data bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, menemukan indikasi kuat bahwa distribusi bantuan selama ini tidak tepat sasaran. "Karena selama ini ditengarai bansos maupun subsidi sosial tidak tepatsasaran," ujarnya.

Kementerian Sosial mencatat, kuota penerima PBI BPJS Kesehatan pada 2026 mencapai 96,8 juta jiwa. Namun, hasil pemadaman data melalui DTSEN menunjukkan ketimpangan distribusi. Di satu sisi, puluhan juta warga miskin belum tercakup. Di sisi lain, sekitar 15 juta warga dari kelompok desil 6 hingga 10--yang tergolong menengah hingga kaya+justru tercatat sebagai penerima subsidi iuran jaminan kesehatan.

"Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025," kata Saifullah Yusuf.

Ia mengakui keterbatasan verifikasi lapangan menjadi salah satu penyebab utama. Sepanjang 2025, Kementerian Sosial baru melakukan ground check terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, jauh dari target lebih dari 35 juta kepala keluarga. Keterbatasan sumber daya dan waktu membuat pemutakhiran data berjalan lambat dan menyisakan kesalahan pencatatan.

Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi dua jenis kesalahan sekaligus. Exclusion error terjadi ketika warga miskin yang seharusnya menerima PBI justru tidak terdaftar. Sebaliknya, inclusion error muncul saat warga yang tidak lagi memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Kedua jenis kesalahan tersebut masih ditemukan dalam jumlah signifikan.

"Makanya kita kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujar Saifullah Yusuf. Namun, ia mengakui upaya tersebut belum sepenuhnya memadai dan perlu diperkuat agar kualitas data terus membaik.

Dampak dari persoalan data ini

terasa langsung di lapangan. Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, Kementerian Sosial melakukan pengalihan dan penonaktifan kepesertaan PBI JKN secara bertahap. Total sekitar 11 juta peserta dinonaktifkan. Kebijakan tersebut memicu kegaduhan publik karena banyak peserta baru mengetahui status nonaktif ketika hendak mengakses layanan kesehatan.

Purbaya:Image Jelek, Pemerintah Rugi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kegaduhan itu tidak terlepas dari lemahnya komunikasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran untuk PBI JKN. Kuota nasional tetap disediakan untuk 96,8 juta peserta, dengan anggaran yang tetap.

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi," kata Purbaya dalam rapat konsultasi bersama DPR.

Menurut dia, penonaktifan serentak dalam jumlah besar tanpa masa transisi telah menciptakan kejutan publik yang seharusnya bisa dihindari.

Purbaya menyebut penonaktifan mendadak tersebut merugikan pemerintah dari dua sisi. Anggaran

tetap terserap, sementara citra pemerintah justru memburuk di mata publik. "Uang yang saya keluarkan sama, tapi image jelek. Pemerintah rugi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa akar persoalan terletak pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar penonaktifan PBI dilakukan secara bertahap, dengan masa transisi dua hingga tiga bulan. Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengakses layanan dan memiliki waktu untuk mengajukan sanggahan.

"Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba tidak eligible," katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menyoroti dampak penonaktifan terhadap pasien dengan penyakit catastropik. Dari sekitar 11 juta peserta yang dinonaktifkan, terdapat sekitar 120 ribu orang dengan riwayat penyakit catastropik, serta sekitar 12 ribu pasien cuci darah yang terdampak langsung.

Menurut Budi, pasien gagal ginjal membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali per minggu. Tanpa jaminan pembiayaan yang berkelanjutan, risiko kematian meningkat. Selain gagal ginjal, pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi, penderita

penyakit jantung, serta anak dengan thalassemia juga bergantung pada kesinambungan kepesertaan JKN.

Untuk meredam dampak tersebut, Budi mengusulkan reaktivasi otomatis sementara kepesertaan JKN selama tiga bulan. Selama periode itu, pemerintah melakukan validasi ulang data penerima bersama Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial.

"Kalau dikalikan, paling Rp5 miliar per bulan. Jadi kita minta Rp15 miliar untuk tiga bulan reaktivasi otomatis," kata Budi.

Menteri Keuangan menyatakan siap mencairkan anggaran Rp15 miliar tersebut. Namun, pencairan baru akan dilakukan setelah BPJS Kesehatan menyelesaikan perbaikan pada satu pos anggaran yang sebelumnya diminta untuk dibenahi. "Mungkin minggu depan juga cair. Tidak ada masalah," ujar Purbaya.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran PBI JKN sebesar Rp56,64 triliun untuk 96,8 juta peserta. Meski demikian, distribusi bantuan masih menyisakan persoalan ketepatan sasaran. Sekitar 59 persen penerima PBI berasal dari kelompok desil 1 hingga 5, sementara sekitar 41 persen lainnya masih berada pada desil 6 hingga 10. (gus,med,kcm,ist/dya)

DPR-Pemerintah Sepakati Bayar Selama 3 Bulan ke Depan

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah langkah untuk menjamin kesehatan, khususnya bagi peserta PBI yang dinonaktifkan. Sebanyak sekitar 11 juta peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional yang statusnya nonaktif dipastikan tetap dilayani dan iurannya dibayarkan pemerintah selama masa pemutakhiran data.

"Dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," ujar Dasco dalam rapat di Komisi V DPR RI, Senin (9/2/2026).

Ia menyebut DPR dan pemerintah sepakat memberi waktu tiga bulan bagi Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan ulang serta pemutakhiran data desil penerima bantuan dengan menggunakan data pembanding terbaru. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan iuran lebih tepatsasaran.

Kesepakatan lain menyangkut penggunaan anggaran negara. DPR meminta agar alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dimaksimalkan secara akurat dan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah. "DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan datayangakurat," kata Dasco.

Di luar aspek pembiayaan, DPR juga meminta BPJS Kesehatan memperbaiki komunikasi publik. Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat memahami status kepesertaan dan tidak mengalami penolakan layanan akibat kesalahan administrasi.

Persoalan pembiayaan juga disorot Komisi IX DPR. Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, mengatakan beban iuran BPJS Kesehatan hingga kini masih banyak ditopang pemerintah daerah. Sekitar 47 juta peserta BPJS tercatat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kondisi ini dinilai menggerus ruang fiskal daerah dan memaksa sejumlah pemerintah daerah memangkas anggaran pembangunan.

"Kami di Komisi IX sering mendapatkan keluhan dari kepala daerah. Mereka merasa terbebani dengan anggaran APBD untuk

menutup BPJS, padahal kemampuan fiskal daerah berbeda-beda. Banyak daerah akhirnya harus memotong anggaran pembangunan atau infrastruktur untuk menambal kekurangan bayar BPJS," ujar Nihayatul di Kompleks Parlemen Senayan.

Dia mempertanyakan mengapa kuota sekitar 50 juta peserta yang telah dialokasikan dalam APBN tidak dimanfaatkan untuk mengambil alih 47 juta peserta yang saat ini dibiayai APBD. Menurut dia, pengalihan itu akan langsung memangkas beban fiskal daerah dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada program pemberdayaan masyarakat.

"Ini harus ada sinkronisasi data yang cepat antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah," ujarnya.

Selain soal pembiayaan, DPR juga menyoroti lemahnya proses verifikasi dan validasi data PBI. Masih ditemukan warga miskin yang seharusnya berhak justru tidak terdata, sementara warga yang secara ekonomi mampu tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Komisi IX meminta Kementerian Sosial melakukan pembersihan data secara berakala dan transparan. (wid,rls,ant/dya)

Korupsi K3 Kementerian Ketenagakerjaan

SETELAH ABJAD K, NOEL BERI CLUE BARU: PARTAI 3 HURUF

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kembali memberi petunjuk baru mengenai dugaan keterlibatan partai politik dalam perkara pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Jika sebelumnya ia menyebut satu partai berinisial huruf "K", kini Noel mengatakan partai yang dimaksud terdiri dari tiga huruf.

Isyarat itu disampaikan Noel kepada wartawan sebelum menjalani sidang lanjutan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/2/2026). Perkara yang menjeratnya saat ini terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam proses penerbitan sertifikat K3.

"(Soal) partai, saya kerucutkan ya. Kemarin kan (berinisial) K. Sekarang, tiga huruf. Untuk sementara itu dulu," ujar Noel singkat.

Namun, Noel menolak menjelaskan lebih jauh apakah tiga huruf yang dimaksud merupakan singkatan atau nama partai secara utuh. Ia juga enggan menyebut warna yang selama ini kerap dilekatkan sebagai identitas partai tersebut. "Sudahlah. Jangan kasih tahu warna lagi," kata Noel.

Noel menegaskan, dirinya tidak ingin menjadi pihak yang secara langsung mengungkap nama partai politik yang diduga terlibat. Menurut dia, pengungkapan seharusnya muncul dari



Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel saat bernyanyi menyenggung KPK usai persidangan, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). (ist)

proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, melalui dakwaan jaksa dan keterangan para saksi.

"Bukan saya yang menyampaikan, tapi fakta persidangan, jaksa, lantas saksi-saksi menyampaikan. Bukan saya," ujarnya.

Pernyataan ini melanjutkan sikap Noel sebelumnya yang juga hanya memberikan petunjuk terbatas. Pada

sidang 26 Januari 2026, ia sempat menyebut ada satu partai berinisial huruf "K" yang terlibat dalam perkara pemerasan sertifikat K3. Saat itu, Noel menolak menguraikan apakah partai tersebut berada di parlemen maupun di luar parlemen.

"Tadi kan sudah ada K-nya kan, enggak mau saya, enggak mau bilang ada parlemen atau enggak," kata Noel

INTIP KEKAYAAN IMMANUEL EBENEZER

TOTAL KEKAYAAN
Rp 17.62 miliar

LHKPN KPK, pada Desember 2024

	Tanah & bangunan	Rp 12.14 miliar
	Kendaraan senilai	Rp 3.33 miliar
	Harta bergerak lainnya	Rp 109.5 Juta
	Kas dan setara kas senilai	Rp 2.02 miliar
	HUTANG	-

Catatan: Kekayaan Noel dilaporkan mengalami kenaikan signifikan sekitar Rp12,7 miliar hingga Rp14,6 miliar dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir.

Purbaya Kembali Diperingatkan: Bapak Bisa Angkat Koper ke KPK

IMMANUEL Ebenezer alias Noel kembali melontarkan pernyataan yang menyenggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai mengikuti sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu menyatakan, hingga kini tidak ada satu pun keterangan saksi dalam persidangan yang mengaitkan dirinya dengan perkara pemerasan sertifikasi K3 yang sedang disidangkan.

"Noel menilai sampai detik ini tidak ada satu pun saksi yang mengaitkan perkara yang selama ini diorkestrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dirinya," kata Noel di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, seluruh saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki hubungan dengan dirinya ketika masih menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

"Tidak ada hubungan antara perkara saya dengan saksi. Dari saksi pertama sampai sekarang," ujarnya menegaskan.

Lebih jauh, Noel menyampaikan kekhawatirannya bahwa perkara yang menjerat dirinya dapat berimbang kepada pihak lain di Kabinet Merah Putih, terutama pejabat yang dinilainya menjalankan kebijakan berpihak kepada rakyat. Salah satu nama yang ia sebut adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Noel, Purbaya berpotensi mengalami perlakuan serupa dengan dirinya atau yang ia sebut sebagai "di-Noel-kan".

"Enggak kalah penting adalah pernyataan saya pertama tentang Pak Purbaya. Artinya, semakin terbukti bahwa informasi A1 tinggal sejengkal lagi. Pak Purbaya, apalagi kemarin KPK bilang 'saya angkat topi ke Pak Purbaya'. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK," kata Noel.

Selanjutnya, Immanuel Ebenezer bersama sepuluh orang lainnya telah

ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 20-21 Agustus 2025. Dalam perkara ini, Noel didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Noel kemudian mengingatkan Purbaya agar berhati-hati dalam menjalankan kebijakan. Ia menilai sejumlah kebijakan Menteri Keuangan berpotensi mengganggu kepentingan elite tertentu.

"Itu pesannya. Hati-hati Pak Purbaya. Beliau punya kebijakan begitu bagus, tapi banyak elite akan terganggu. Karena banyak pemain-pemain liar di republik ini. Dengan kebijakan Pak Purbaya, mereka sangat terganggu," ujar Noel.

Ia menutup pernyataannya dengan kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut Noel, sistem hukum di Tanah Air masih rentan dipengaruhi kepentingan tertentu.

"Ingat, hukum di republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya saya mau bikin yang namanya Komisi Penitipan Kasus," kata Noel.(gus,lip,ist/dya)

saat itu. Ia juga menolak menyebut warna khas partai tersebut. "Partainya ada K-nya. Nah. Cukup itu saja dulu," ujarnya.

Selain melempar petunjuk soal partai politik, Noel juga kembali menyampaikan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai persidangan, ia menyindir praktik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Kritik itu disampaikan Noel melalui lagu berjudul OTT Bocil, pelesetan dari lagu Bento karya Iwan Fals.

Dalam pernyataannya, Noel menyebut penegakan hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan oleh pihak-pihak tertentu. "Ingat, hukum di republik ini bisa dibeli, apalagi yang namanya Komisi Penitipan Kasus," ujar Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ia bahkan menyebut praktik OTT sebagai "operasi tipu-tipu" dan mengklaim ingin menyampaikan kritik itu melalui lagu. "Saya pengen nyanyi sebenarnya nih, boleh nggak nyanyi, judulnya OTT Bocil," kata Noel. (wid,ist,kum/dya)